



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN 2024

BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
KOTA JAKARTA SELATAN



BNN KOTA JAKARTA SELATAN  
Gd. WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
JL. PRAPANCA RAYA NO.9, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan Tahun 2024 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan dalam kurun waktu tahun 2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LKIP BNN Kota Jakarta Selatan Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2024 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2024 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja BNN di tahun 2024.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menjadi bagian dari upaya untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas kinerja kita secara terukur dan melembaga.

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kota Jakarta Selatan



BAMBANG YUDISTIRA, S.Sos., M.Si.

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN GRAFIK.....</b>	<b>iii</b>
<b>EXECUTIVE SUMMARY .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A Umum .....	1
B Dasar Hukum .....	4
C Kedudukan, Tugas dan Fungsi .....	4
D Struktur Organisasi .....	5
E Sistematika Penyajian .....	7
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>8</b>
A Rencana Strategis BNN .....	8
B Rencana Kinerja Tahunan .....	12
C Perjanjian Kinerja .....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>15</b>
A Capaian Kinerja .....	15
B Realisasi Anggaran Tahun 2024 .....	46
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
A Kesimpulan .....	47
B Saran .....	47

### LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja BNN Kota Jakarta Selatan Tahun 2024
2. Realisasi Anggaran per Jenis Kegiatan T.A. 2024
3. Hasil Perhitungan Dektari 2024
4. Hasil Perhitungan Dektara 2024
5. Hasil Perhitungan IKP
6. Hasil Pengukuran IKM, IKR, dan Prosentase Peningkatan Kualitas Hidup T.A. 2024

## DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN GRAFIK

		<b>Hal</b>
TABEL 2.1	Rencana Kinerja Tahunan BNN Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2024.....	12
TABEL 2.2	Perjanjian Kerja BNN Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2024.....	14
TABEL 3.1	Realisasi Capaian Kinerja BNN Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2024 .....	15
TABEL 3.2	Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba .....	17
TABEL 3.3	Perhitungan Hasil Indeks Ketahanan Diri Remaja.....	18
TABEL 3.4	Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba .....	19
TABEL 3.5	Hasil Perhitungan Indeks Ketahanan Diri Keluarga.....	21
TABEL 3.6	Indikator Kinerja Indeks Kemandirian Partisipasi .....	22
TABEL 3.7	Hasil Perhitungan Indeks Kemandirian Partisipasi.....	24
TABEL 3.8	Indikator Kinerja Presentase penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup.....	26
TABEL 3.9	Indikator Kinerja Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM .....	28
TABEL 3.10	Indikator Kinerja Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional..	29
TABEL 3.11	Daftar Fasilitas Rehabilitasi yang Operasional.....	30
TABEL 3.12	Indikator Kinerja Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM .....	32
TABEL 3.13	Indikator Kinerja Indeks kepuasan layanan Rehabilitasi Narkotika.....	33
TABEL 3.14	Indikator Kinerja Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang P-21 .....	39
TABEL 3.15	Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BNN Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2024 .....	41
TABEL 3.16	Hasil Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BNN Kota Jakarta Selatan .....	42
TABEL 3.17	Laporan Pagu T.A. 2024.....	43
TABEL 3.18	Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Jakarta Selatan .....	44
TABEL 3.19	Hasil Pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Jakarta Selatan .....	45
TABEL 3.20	Realisasi Anggaran BNN Kota Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2024 .....	46

GAMBAR 1.1	Struktur Organisasi BNN Kota Jakarta Selatan Tahun 2023.....	6
GAMBAR 2.1	Visi dan Misi Presiden RI 2020-2024.....	8
GAMBAR 2.2	Visi BNN 2024.....	9
GAMBAR 2.3	Tujuan BNN 2020-2024.....	10
GRAFIK 3.1	Indeks Kemandirian Partisipasi.....	24
GRAFIK 3.2	Karakteristik Klien Rehabilitasi berdasarkan Jenis Kelamin.....	37
GRAFIK 3.3	Karakteristik Klien Rehabilitasi berdasarkan Pekerjaan.....	38
GRAFIK 3.4	Karakteristik Klien Rehabilitasi berdasarkan Sebaran Zat.....	38
GRAFIK 3.5	Karakteristik Klien Rehabilitasi berdasarkan Usia.....	39
GRAFIK 3.6	Nilai Kinerja Anggaran 2024 berdasarkan Aplikasi SMART.....	42
GRAFIK 3.7	Perbandingan Nilai IKPA T.A. 2022-2024.....	45

## **EXECUTIVE SUMMARY**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 65 menyebutkan bahwa Badan Narkotika Nasional memiliki perwakilan yang berkedudukan di Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia. Sesuai dengan bunyi Undang-Undang dimaksud, Badan Narkotika Nasional melalui Peraturan Kepala BNN Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

Badan Narkotika Nasional, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota melaksanakan Program dan Kegiatan dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba (P4GN) di wilayahnya masing-masing. BNN Kota Jakarta Selatan sebagai lembaga vertical di bawah BNN RI pada tahun 2013 melaksanakan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan, sebagai berikut :

***Sasaran Kegiatan : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika***

***Indikator Kinerja 1 : Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba***

Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba merupakan indeks pengukuran “Kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba”. Indikator Kinerja ini memiliki target 52.00 dan terealisasi 55.64 atau sebesar 107%.

***Sasaran Kegiatan : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika***

***Indikator Kinerja 2 : Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba***

Indikator Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba diukur melalui beberapa kegiatan antara lain Pendampingan program ketahanan keluarga.

Indikator Kinerja ini memiliki target 83.482 dan terealisasi 75.982 atau sebesar 91,02%.

***Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN***

***Indikator Kinerja 3 : Indeks Kemandirian Masyarakat***

Indikator Indeks Kemandirian Partisipasi diukur dari akumulasi jumlah indeks (indikator) dari peran serta masyarakat yang dilakukan secara mandiri dalam upaya P4GN di lingkungannya oleh Penggiat Anti Narkoba. Target indikator kinerja ini adalah 3.30 dan terealisasi 3.72 atau 112,73%

***Sasaran Kegiatan : Meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkoba***

***Indikator Kinerja 4 : Persentase penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup***

Indikator Nilai Keterpulihan ini diukur melalui program pasca rehabilitasi. Target indikator kinerja ini adalah 68 dan terealisasi 75,24 atau 110,65%.

***Sasaran Kegiatan : Meningkatnya tenaga teknis rehabilitasi***

***Indikator Kinerja 5 : Jumlah petugas Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih***

Intervensi Berbasis Masyarakat merupakan kepedulian pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di masyarakat dengan cara menghadirkan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di masyarakat, mengingat ketersediaan dan aksesibilitas layanan yang masih terbatas jumlahnya. Target yang ingin dicapai yaitu 10 orang petugas IBM yang dilatih dan terealisasi 10 orang petugas IBM yang dilatih atau tercapai 100%.

***Sasaran Kegiatan : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi Narkotika***

***Indikator Kinerja 6 : Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional***

Jumlah fasilitas Rehabilitasi yang operasional adalah lembaga instansi medis yang ditunjuk untuk menjalankan program rehabilitasi dan telah melaksanakan program rehabilitasi pada klien.

Target yang ingin dicapai adalah 3 dan hasil yang diperoleh adalah 4 atau sebesar 133,34%.

**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika**

**Indikator Kinerja 7 : Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM**

Target Indikator Kinerja ini adalah 2 Unit dan terealisasi 2 Unit atau sebesar 100%.

**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi**

**Indikator Kinerja 8 : Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kota Jakarta Selatan**

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh BNN Kota Jakarta Selatan terhadap Klien Rehabilitasi.

Target Indikator Kinerja ini 3.60 dan terealisasi 3,72% atau 103,33%.

**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja secara Efektif dan Efisien**

**Indikator Kinerja 9 : Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Jakarta Selatan**

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja diukur melalui aspek implementasi dengan indikator pengukuran meliputi Realisasi anggaran, Konsistensi RPD, CRO, Efisiensi dan Nilai Efisiensi.

Target yang ingin dicapai adalah 89, sedangkan hasil yang diperoleh adalah 98,18 atau 110,31%.

**Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan yang Sesuai Prosedur**

**Indikator Kinerja 11 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran**

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi,

efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Target yang ingin dicapai adalah 97.29, sedangkan hasil yang diperoleh adalah 96.35 atau 99.03%.

Pagu anggaran untuk mendukung Program di atas sebesar Rp 1.990.055.000,- (*Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp 1.978.934.784,- (*Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) dan persentase realisasi anggaran sebesar **99,44%**.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Umum**

Narkoba (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) merupakan senyawa yang dapat menimbulkan resiko *addict* bagi penikmatnya. Fenomena meningkatnya jumlah korban Narkoba adalah sebuah gejala semakin memprihatinkannya peredaran, produksi dan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat Indonesia. Akar permasalahan narkoba ini pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti faktor perekonomian, kemiskinan, pendidikan yang rendah, pola asuh yang kurang baik dan tingginya tingkat mobilitas masyarakat yang tinggal di suatu tempat tertentu.

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menjadi permasalahan serius yang perlu diberantas dan ditangani secara komprehensif. Menurut hasil Survei antara BNN dan LIPI tahun 2022, Provinsi DKI Jakarta berada pada urutan ketiga dengan angka prevalensi pernah memakai narkoba sebesar 4,90%, dan turun menjadi 3,30% ketika prevalensi itu didasarkan pada pemakaian narkoba dalam satu tahun terakhir. Dengan kata lain, sekitar 195.367 penduduk yang pernah memakai narkoba, di antara mereka yang masih aktif memakai narkoba dalam satu tahun terakhir turun sekitar 32,20% menjadi 132.452 jiwa. Kontribusi DKI Jakarta terhadap pembentukan angka prevalensi nasional pernah memakai narkoba berkisar 4,31%.

Posisi DKI Jakarta yang berada di urutan ketiga terbesar dengan angka prevalensi itu beririsan dengan posisi DKI Jakarta yang menjadi ibukota negara sekaligus pusat bisnis, industri, perdagangan dan hiburan. Arus urbanisasi dari seluruh pelosok tanah air yang masuk wilayah DKI Jakarta dengan berbagai tingkat ekonomi, sosial dan pendidikan juga tinggi di DKI Jakarta, sehingga tingkat kepadatan penduduk relatif tinggi juga, yaitu sebesar 15.663 jiwa/Km<sup>2</sup> pada tahun 2018. Tingkat kepadatan yang tinggi itu memunculkan berbagai persoalan sosial, termasuk penyalahgunaan narkoba. Oleh sebab itu,

tidak heran kalau di wilayah DKI Jakarta disinyalir terdapat 113 daerah rawan penyalahgunaan narkoba, meliputi Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat.

Kota Jakarta Selatan dengan jumlah penduduk 2,23 juta jiwa yang tersebar di 10 Kecamatan dan 65 Kelurahan memiliki kondisi wilayah yang berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Jakarta Timur. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Depok, dan sebelah barat dengan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Karakteristik Kota Administrasi Jakarta Selatan:

1. Daerah Resapan Air
2. Kawasan ekonomi prospektif di kawasan Segitiga
3. Pengembangan kawasan bernilai sejarah di Kebayoran
4. Kawasan perwakilan negara asing khususnya di Segitiga Kuningan, Sekretariat ASEAN, KPK, Mabes POLRI, Kantor Kementerian (Nakertrans, PU, Hukum dan HAM, Kesehatan, dsb)
5. Pengembangan pusat pembibitan dan penelitian tanaman dan perikanan;
6. Pengembangan kawasan Perkampungan Budaya Betawi sebagai lingkungan Cagar Budaya; dan Dikembangkannya Kawasan Kemang dan Manggarai; Penataan Kawasan Mayestik.

Melihat karakteristik wilayah Kota Administrasi tersebut, Jakarta Selatan adalah kota administrasi yang paling kaya dibandingkan dengan wilayah lainnya, dengan banyaknya perumahan warga kelas menengah ke atas dan tempat pusat bisnis utama. Sehingga, kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Jakarta Selatan saat ini bukan hanya didominasi oleh orang dewasa, namun sudah merambah ke usia remaja bahkan kalangan pelajar. Hal ini disebabkan oleh kondisi mental yang masih labil dan tergiur dengan keuntungan besar sehingga dijadikan ajang bisnis barang haram.

Sejak tahun 2013, BNN Kota Jakarta Selatan sebagai salah satu perwakilan BNN di daerah memiliki tugas menyelenggarakan Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Jakarta Selatan. Dalam pelaksanaan tugas tentunya harus diiringi dengan dukungan dari masyarakat Kota Jakarta Selatan agar program dapat berjalan dengan baik

Dalam menangani permasalahan narkoba, strategi yang digunakan yaitu melalui strategi *demand reduction* dan *supply reduction*. *Demand reduction* yaitu tindakan preventif guna memberikan kekebalan kepada masyarakat agar mereka imun terhadap penyalahgunaan narkoba sedangkan *supply reduction* adalah tindakan penegakan hukum yang tegas dan terukur agar sindikat narkoba jera.

Strategi *demand reduction* yang dilakukan adalah melalui kegiatan Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Rehabilitasi. Kegiatan Pencegahan yang dilakukan berupa kegiatan Advokasi, dan Kampanye Stop Narkoba, sedangkan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan melalui kegiatan Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba, Pengembangan Kapasitas dan Tes Urine sebagai upaya deteksi dini penyalahgunaan narkoba. Sementara untuk kegiatan di bidang rehabilitasi, BNN Kota Jakarta Selatan melaksanakan kegiatan rehabilitasi rawat jalan, pascarehabilitasi dan konseling dengan tujuan membimbing klien untuk memelihara pemulihannya agar tidak *relapse* dan mempersiapkan diri agar mampu menjalankan fungsi sosialnya sesuai dengan potensi diri yang dimilikinya. Selain itu, BNN Kota Jakarta Selatan juga melaksanakan kegiatan penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah dan Komponen Masyarakat dengan tujuan lembaga rehabilitasi tersebut dapat memberikan pelayanan kepada para penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkoba. Sementara untuk strategi *supply reduction* dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan untuk mendapatkan informasi awal tentang jaringan peredaran narkoba.

Adapun dalam mempertanggungjawabkan kegiatan, setiap tahun BNN Kota Jakarta Selatan membuat sebuah laporan yang disebut sebagai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP ini disusun berpedoman pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah (SAKIP) BNN yang meliputi komponen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN.
7. Keputusan Kepala BNN Nomor : KEP/388/XII/2015/BNN tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN.

## **C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

### **1. Kedudukan**

BNN Kota Jakarta Selatan secara struktural berkedudukan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala BNN RI melalui Kepala BNN Provinsi DKI Jakarta.

### **2. Tugas**

BNN Kota Jakarta Selatan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

### **3. Fungsi**

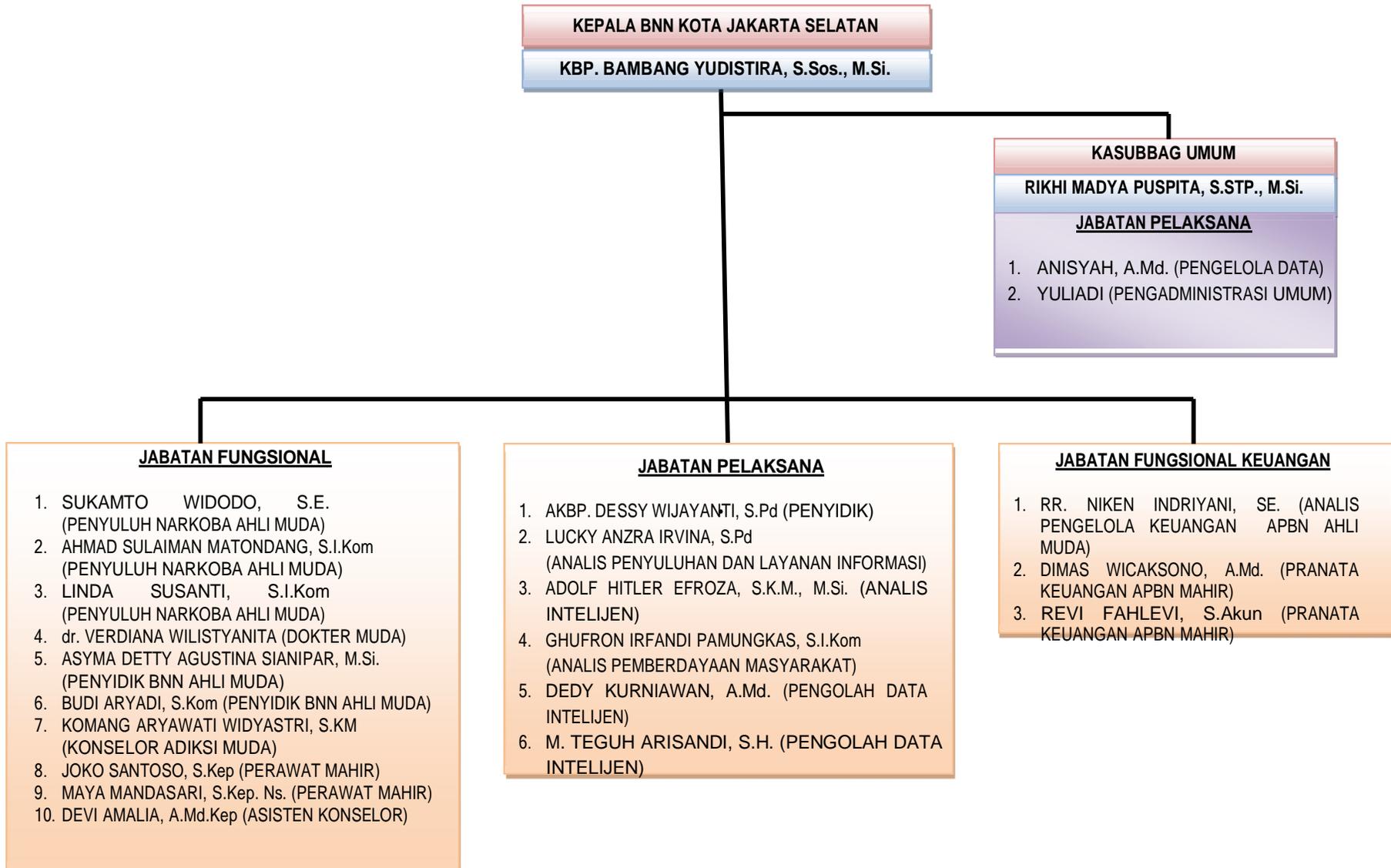
1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
4. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama P4GN dengan Instansi Pemerintah terkait dan Komponen Masyarakat dalam wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
5. Pelayanan administrasi BNN Kota Jakarta Selatan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNN Kota Jakarta Selatan.

## **D. Struktur Organisasi**

### **1. Susunan Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan terdiri atas:**

1. Kepala
2. Kepala Sub Bagian Umum
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kelompok Jabatan Pelaksana

**GAMBAR 1.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI BNN KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2023**



## **E. Sistematika Penyajian**

LKIP BNN Kota Jakarta Selatan menginformasikan pencapaian kinerja BNN Kota Jakarta Selatan dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

### **Bab I   Pendahuluan**

Dalam bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi BNN Kota Jakarta Selatan

### **Bab II   Perencanaan Kinerja**

Dalam bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024

### **Bab III  Akuntabilitas Kinerja**

Dalam bab ini disajikan tentang :

- A. Capaian kinerja BNN Kota Jakarta Selatan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja BNN Kota Jakarta Selatan.
- B. Realisasi Anggaran

### **Bab IV  Penutup**

Dalam bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja BNN Kota Jakarta Selatan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran-lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Pengukuran Kinerja

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis BNN

Dalam rangka menentukan arah pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang sesuai dengan Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional RI (Renstra BNN tahun 2020-2024) dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan sebagai instansi vertikal BNN di Provinsi DKI Jakarta merupakan pelaksana kebijakan dan operasional program dan kegiatan P4GN yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BNN.

Sebagai instansi vertikal Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta, BNN Kota Jakarta Selatan akan menindaklanjuti Rencana Strategis (Renstra) BNN ke dalam program dan kegiatan. Dalam mengaktualisasi organisasi sebagai instansi pemerintah yang berada di wilayah dan sebagai cita-cita luhur yang akan diwujudkan Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan, maka perlu menindaklanjuti Visi dan Misi BNN dan Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan Tahun 2020-2024 mengacu pada Visi dan Misi Presiden RI terpilih Periode 2020-2024 sebagai berikut:



<b>VISI</b>	<p><b>VISI Presiden Jokowi-Mahruf Amin Dalam Nawa Cita, adalah:</b>  <i>“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”</i></p> <p><b>VISI BNN adalah:</b>  <i>“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba”</i></p>
-------------	--

Dalam upaya untuk mewujudkan visi di atas, maka Presiden Jokowi-Mahruf Amin juga telah menetapkan MISI yang juga menjadi bagian MISI Badan Narkotika Nasional, yaitu:

<b>MISI</b>	<p>Menyatukan dan menggerakkan segenap potensi masyarakat dalam upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan kualitas hidup manusia yang tinggi, maju dan mandiri bagi masyarakat Kota Jakarta Utara.</li> <li>2. Percepatan Indonesia Bebas Narkoba</li> </ol>
-------------	---

Berdasarkan visi dan misi Presiden RI Tahun 2020-2024, BNN merumuskan visi dan misi Tahun 2020-2024 yang merupakan penerjemahan atau penyelarasan atas visi dan misi Presiden sebagai berikut:

**Visi BNN 2024**

**TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG TERLINDUNGI DAN TERSELAMATKAN DARI KEJAHATAN NARKOTIKA**  
*Mengikuti Visi Presiden 2020-2024*

**Misi BNN 2020-2024**

1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika secara Profesional
2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika
3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan



Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan VISI dan MISI tersebut di atas, serta berpedoman pada Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, maka Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penanganan permasalahan narkoba secara seimbang antara <i>demand reduction</i> dan <i>supply reduction</i>.</li> <li>Mengembangkan berbagai upaya dalam penanganan permasalahan narkoba secara holistik, integral, dan berkelanjutan.</li> <li>Menjadi <b>Perwakilan</b> BNN di Kota Jakarta Selatan yang <b>Profesional</b> dan mampu <b>menyatukan dan menggerakkan</b> seluruh komponen masyarakat, Instansi Pemerintah, dan Swasta di Kota Jakarta Selatan di dalam melaksanakan Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).</li> </ol>
-----------------------	--

Adapun strategi-strategi yang ditempuh Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan dalam melaksanakan kebijakan tersebut pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

<b>STRATEGI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mengintegrasikan program pencegahan penyalagunaan narkoba ke dalam seluruh isu dan sektor pembangunan melalui konsep penganggaran berwawasan anti narkoba, kebijakan berbasis anti narkoba, serta mendorong pembangunan karakter manusia dengan memasukkan nilai-nilai hidup sehat tanpa narkoba ke dalam kurikulum pendidikan dasar sampai lanjutan atas;</li><li>b. Menumbuh-kembangkan kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dari tingkat desa/kelurahan dengan mendorong relawan-relawan menjadi pelaku P4GN secara mandiri;</li><li>c. Mengembangkan akses layanan rehabilitasi penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba yang terintegrasi dan berkelanjutan, serta pengoptimalkan peran K/L dalam pemanfaatan infrastruktur dan sumber daya K/L;</li><li>d. Mengungkap jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan menyita seluruh aset terkait kejahatan narkotika dengan menjalin kerja sama dan kemitraan yang harmonis dengan penegak hukum baik dalam maupun luar negeri khususnya dalam mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba;</li><li>e. Melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi good governance dan clean goverment di lingkungan BNN Kota Jakarta Selatan.</li></ol>
-----------------	--

## A. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran Renstra dalam target tahunan dan media penghubung antara Renstra dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam 1 (satu) tahun. Untuk tahun 2024 BNN Kota Jakarta Selatan memiliki rencana kinerja tahunan sebagai berikut :

**TABEL 2.1**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN BNN KOTA JAKARTA SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Kebutuhan Pendanaan
1	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	52.00 Indeks	70.000.000
2	Penyelenggara an Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	83.482 Indeks	106.000.000
3	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.30 Indeks	217.645.000
4	Penguatan Lembaga Rehabilitasi	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	15.115.000
5	Penguatan Lembaga Rehabilitasi	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga	6.790.000
6	Penguatan Lembaga Rehabilitasi	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 Unit	52.995.000

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Kebutuhan Pendanaan
6	Penguatan Lembaga Rehabilitasi	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.60 Indeks	
7	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan	30 Orang	35.350.000
8	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Jakarta Selatan	89 Indeks	7.091.000
9	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Jakarta Selatan	97.29 Indeks	87.308.000

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen yang disusun oleh pimpinan satuan kerja dan disetujui oleh pejabat atasannya. Perjanjian Kinerja memuat pernyataan Perjanjian Kinerja aparatur dan lampiran yang berisi program-program utama, sasaran yang akan dicapai dan ukuran-ukuran kinerja yang jelas. Perjanjian Kinerja BNN Kota Jakarta Selatan Tahun 2024 disusun berdasarkan program yang telah ditentukan target kinerjanya dan yang akan dicapai selama tahun 2024.

Perjanjian Kinerja BNN Kota Jakarta Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL 2.2**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA SELATAN**

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja	52 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	83.482 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Masyarakat	3.30 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 Indeks
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.60 Indeks
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	89 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN	97.29 Indeks

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan tidak tercapainya pelaksanaan kegiatan, misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

**A. Capaian Kinerja**

**1. Ringkasan Kinerja**

BNN Kota Jakarta Selatan menetapkan 9 (sembilan) sasaran kegiatan yang akan dicapai dengan indikator kinerja sebanyak 10 (sepuluh) indikator. Adapun realisasi pencapaian kinerja kegiatan tersebut sebagaimana tabel berikut :

**TABEL 3.1**  
**REALISASI CAPAIAN KINERJA BNN KOTA JAKARTA SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	Indeks	52,00	55,64	107,00%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	Indeks	83,48	75,982	91,02%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks kemandirian masyarakat	Indeks	3,30	3,03	91,82%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	%
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	Indeks	68,00	75,24	110,65%
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	Orang	10,00	10	100,00%
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	Lembaga	3,00	4	133,33%
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	Unit	2,00	2	100,00%
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkoba	Indeks	3,60	3,72	103,33%
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran	Indeks	89,00	98,18	110,31%
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Indeks	97,29	96,35	99,03%

## 2. Analisis Capaian Kinerja

Untuk mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja BNN Kota Jakarta Selatan tahun 2024, BNN Kota Jakarta Selatan melakukan pengukuran capaian kinerja melalui evaluasi pelaksanaan kegiatan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel kemudian dianalisa secara deskriptif atau dalam bentuk narasi. Evaluasi capaian sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan sebagaimana uraian berikut :

### Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Jakarta Selatan Tahun 2024 yaitu :

**Tabel 3.2**  
**Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba**

Capaian 2022		Capaian 2023		Capaian 2024			Target Akhir 2025
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	
51,00	50,08	51.00	44.28	<b>52.00</b>	<b>55.64</b>	<b>107%</b>	55,64

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah melalui Pengukuran Ketahanan Diri Anti Narkoba pada Remaja sebagai “Kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba”.

Alat untuk mengukur Indeks Ketahanan Diri Remaja telah dilaksanakan melalui tautan link [dektari.bnn.go.id](http://dektari.bnn.go.id) oleh Biro Perencanaan BNN melalui metode ADS (*Anti Drugs Scale*). Alat ukur ADS ini terdiri dari 3 (tiga) dimensi, yaitu *self regulation*, *assertiveness*, dan *reaching out* yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kemampuan individu dalam menghadapi dorongan, keinginan atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba. Metode ini menggunakan Model Full Form adalah yang digunakan dengan kuesioner sebanyak 47 (empat puluh tujuh) pertanyaan ADS dan 28 (dua puluh delapan) pertanyaan prediktor.

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut:

**TABEL 3.3**  
**Perhitungan Hasil Indeks Ketahanan Diri Remaja**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (55.64/52) * 100\%$ $= 107 \%$	$\sum \text{RIK} =$ Jumlah Realisasi $\sum \text{TIK} =$ Jumlah Target

Adapun klasifikasi indeks rata-rata ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan dengan tabel sebagai berikut:

Sangat Rendah :  $\leq 45,97$                       Rendah :  $45,98 - 49,73$   
Tinggi :  $49,74 - 53,50$                       Sangat Tinggi :  $\geq 53,51$

Target Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (DEKTARI) pada Tahun 2024 pada BNN Kota Jakarta Selatan adalah 52 dan dari hasil perhitungan Indeks tersebut pada tahun 2024 BNN Kota Jakarta Selatan memperoleh nilai indeks 55.64, masuk dalam kategori Sangat Tinggi, dimana hasil indeks tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2023 dengan nilai 44.08 (Kategori Sangat Rendah).

Faktor pendukung Kenaikan target DEKTARI BNN Kota Jakarta Selatan di tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Semakin meningkatnya pemahaman dan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.
2. Tingkat kepedulian peserta yang tinggi sangat membantu terhadap upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Kemampuan menyediakan bahan yang menarik dan bermutu.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan BNN Kota Jakarta Selatan dalam mengatasi hambatan pengisian kuesioner diantaranya adalah dengan melaksanakan pendampingan kepada para responden terkait cara

pengisian, namun petugas tidak mengintervensi jawaban yang diberikan oleh para responden.

### **Sasaran Kegiatan 2**

Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika

Keluarga dinilai menjadi alternatif pencegahan yang paling efektif dalam meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkoba. Di tahun 2024 ini, BNN ditantang untuk mampu memenuhi target indeks ketahanan keluarga 83.482.

Ketahanan Keluarga anti narkoba merupakan kemampuan keluarga untuk meningkatkan daya tangkal dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dimensi ketahanan keluarga anti narkoba adalah sistem keyakinan, proses organisasi, dan proses komunikasi.

**Tabel 3.4**  
**Indikator Kinerja Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba**

Capaian 2022		Capaian 2023		Capaian 2024			Target Akhir 2025
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	
78,67	79,196	78.67	83.482	<b>83.482</b>	<b>75.982</b>	<b>91.02</b>	78.700

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tentang Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain Pendampingan program ketahanan keluarga.

Indikator kinerja tersebut di atas merupakan upaya melibatkan peran keluarga dalam program ketahanan keluarga anti narkoba untuk memastikan kelangsungan hidup sehat dari penyalahgunaan narkoba. Kegiatan-kegiatan yang secara langsung dilakukan oleh BNN Kota Jakarta Selatan dalam meningkatkan keterlibatan keluarga adalah :

1. Kordinasi dalam rangka pelaksanaan program ketahanan keluarga

anti Narkoba.

2. Fasilitasi pelaksanaan program ketahanan keluarga anti Narkoba.
3. Intervensi ketahanan keluarga berbasis sumber daya pembangunan desa.

Metode pengukuran yang digunakan adalah dengan melalui aplikasi Deklara dengan mengambil sampel di Kelurahan Cipete, Jakarta Selatan untuk dilakukan intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua). Metode pengukuran yang digunakan adalah melalui kuesioner kepada 5 (lima) keluarga yang terdiri dari 5 (lima) Ibu dan 5 (lima) Anak, dengan kuesioner yang diberikan dan dinilai oleh Direktorat Advokasi, Deputi Bidang Pencegahan BNN.

Klasifikasi indeks rata-rata ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai berikut :

- kategori sangat tinggi dengan nilai 88,31 - 100
- kategori tinggi dengan nilai 76,61 - 88,30
- kategori rendah dengan nilai 65,00 - 76,60
- kategori sangat rendah dengan nilai 25,00 - 64,99

**TABEL 3.5**  
**Hasil Perhitungan Indeks Ketahanan Diri Keluarga**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	$=(\frac{\sum RIK}{\sum TIK}) * 100\%$	$=(\frac{83.482}{75.982}) * 100\%$ = 91,02%	$\sum RIK =$ Jumlah  Realisasi $\sum TIK =$ Jumlah Target

Dari hasil pencapaian Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di BNN Kota Jakarta Selatan Tahun 2024 dengan nilai 75.982 yaitu kategori Rendah.

Pencapaian target DEKTARA BNN Kota Jakarta Selatan di tahun

2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023. Adapun faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan penyebaran kuesioner dalam rangka menghitung Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah sebagai berikut:

- b. Terlalu banyak link survey dalam penilaian Dektera yaitu terdapat 10 link survey
- c. Waktu pengisian yang terbatas, pengisian bagi responden dengan waktu pengisian 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan kegiatan dan hanya diberikan waktu pengisian survey kurang lebih 2 sampai dengan 3 minggu
- d. Peserta kurang memahami pertanyaan dalam form sehingga pertanyaan tidak terjawab dengan baik.
- e. Keluarga (orang tua dan anak) yang mengikuti program dan kegiatan keluarga memiliki latar belakang yang bervariasi terkait dengan pemahaman penyalahgunaan narkoba, sehingga terdapat disparitas pemahaman dari masing - masing peserta yang mengikuti program dan kegiatan
- f. kesibukan orang tua dan jadwal pelajaran anak disekolah yang menjadi tantangan tersendiri

Dari beberapa faktor penghambat dalam penyebaran kuesioner, BNN Kota Jakarta Selatan telah berupaya untuk mengatasi hal tersebut diantaranya dengan melaksanakan pendampingan kepada para responden terkait cara pengisian, namun petugas tidak mengintervensi jawaban yang diberikan oleh para responden.

### **Sasaran Kegiatan 3**

Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Jakarta Selatan tahun 2024 yang terdiri dari

1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Indikator Kinerja Indeks Indeks Kemandirian Partisipasi**

Capaian 2022		Capaian 2023		Capaian 2024			Target Akhir 2024
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	
3,10	3,25	3,10	3,215	<b>3,30</b>	<b>3,03</b>	<b>91,82</b>	3,35

Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) dalam pelaksanaan P4GN adalah akumulasi jumlah indeks (indikator) dari peran serta masyarakat yang dilakukan secara mandiri dalam upaya P4GN di lingkungannya oleh Penggiat Anti Narkoba. Adapun yang dimaksud lingkungan para penggiat anti Narkoba adalah lingkungan yang terdiri dari : lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan (sekolah, kampus, pondok pesantren, kursus, sekolah kedinasan, kejuruan, dll), dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll).

Instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan dari identifikasi-identifikasi :

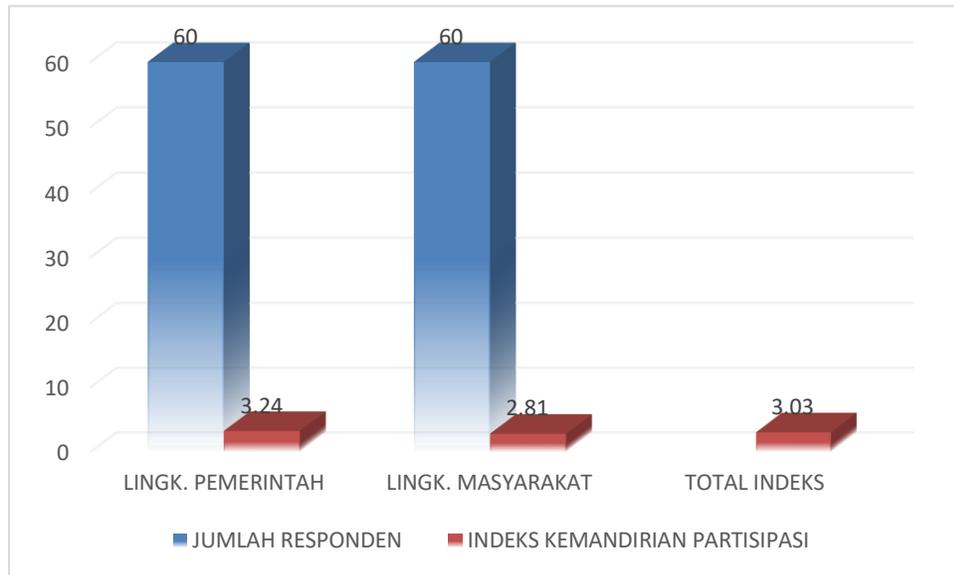
1. **Adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba)** di suatu lingkungan masyarakat yang menjadi figur dan biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
2. **Adanya metode dalam P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanaan Tes Urine)** atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
3. **Adanya anggaran dalam P4GN** untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.
4. **Adanya sarana dan prasarana yang tidak tersedia** yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi maupun sudah tersedia, yang

digunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan diluar lingkungannya.

5. **Adanya sistem, regulasi, aturan yang mengikat** yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungan Masyarakat.
6. **Adanya kegiatan P4GN yang telah dilaksanakan** yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat anti Narkoba.

Pada tahun 2024, BNN Kota Jakarta Selatan telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada lingkungan pemerintah dan lingkungan pendidikan. Dari hasil perhitungan kuesioner penilaian IKP yang telah dibagikan di kedua lingkungan tersebut didapatkan hasil sebagai berikut :

Grafik 3.1 Indeks Kemandirian Partisipasi



	Ling. Pemerintah	Ling. Masyarakat	Total Indeks
Jumlah Responden	60	60	120
Indeks	3,24	2,81	3,03

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut :

**TABEL 3.7**  
**Hasil Perhitungan Indeks Kemandirian Partisipasi**

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Indeks Kemandirian Partisipasi	$=(\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$=(3,03/3,30)*100\%$ $= 91,82\%$	$\sum \text{RIK} = \text{Jumlah Realisasi}$ $\sum \text{TIK} = \text{Jumlah Target}$

Nilai Indeks Kemandirian Partisipatif

- 1,00 – 1,75 : Tidak Mandiri
- 1,76 – 2,50 : Kurang Mandiri
- 2,51 – 3,25 : Mandiri
- 3,26 – 4,00 : Sangat Mandiri

Dari hasil pencapaian Indeks Kemandirian Partisipasi di Kota Jakarta Selatan pada tahun 2024, didapatkan nilai indeks 3,03 dengan kategori Mandiri.

Target Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) pada Tahun 2024 adalah 3.30 dengan capaian 3.03 atau sebesar 91,82%. Apabila dibandingkan dengan pencapaian BNN Kota Jakarta Selatan pada tahun 2023, mengalami penurunan namun penurunan tersebut tidak terlalu signifikan dan masih di atas target secara nasional.

Hal ini dapat terwujud karena adanya peningkatan partisipasi, kesadaran, kepedulian dan kemandirian dari masyarakat Kota Jakarta Selatan dalam upaya memerangi narkoba. Instansi Pemerintah dan Lingkungan Masyarakat sudah semakin menyadari akan bahaya penyalahgunaan narkoba.

Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan penyebaran kuesioner dalam rangka menghitung Indeks Kemandirian Partisipasi adalah sebagai berikut:

- a. Waktu pengisian data kuesioner yang terbatas
- b. Isian data kuesioner yang terlalu banyak
- c. Bahasa kuesioner yg kurang dimengerti oleh responden
- d. Adanya keterbatasan waktu dan dana operasional untuk melaksanakan aksi P4GN di lingkungannya sehingga kegiatan yang dilaksanakan kurang berdampak di masyarakat

- e. Kurangnya partisipasi dari masyarakat sehingga program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kurang mampu menciptakan lingkungan yang tangguh agar bisa menciptakan lingkungan yang BERSINAR (Bersih Narkoba)

Dari beberapa faktor penghambat dalam penyebaran kuesioner, BNN Kota Jakarta Selatan telah berupaya untuk mengatasi hal tersebut diantaranya dengan melaksanakan pendampingan kepada para responden terkait cara pengisian, namun petugas tidak mengintervensi jawaban yang diberikan oleh para responden. BNN Kota Jakarta Selatan juga terus mendorong stakeholder agar berupaya melaksanakan aksi P4GN secara berkelanjutan di lingkungan masing-masing.

**Sasaran Kegiatan 4**  
Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Jakarta Selatan tahun 2024 yang terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Indikator Kinerja Presentase penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup**

Capaian 2022		Capaian 2023		Tahun Anggaran 2024			Target Akhir 2024
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	
-	-	64	72.2	68	75.24	110,65%	75.24

Untuk mencapai target pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba, BNN Kota Jakarta Selatan melaksanakan kegiatan pascarehabilitasi yang merupakan rangkaian proses akhir dari rehabilitasi berkelanjutan yang diberikan kepada klien yang telah menyelesaikan layanan intervensi atau rehabilitasi baik rawat inap

maupun rawat jalan sehingga dapat membantu klien dalam proses pemulihan dan meningkatkan kualitas hidup.

Kegiatan tersebut merupakan tahapan pembinaan lanjut yang diberikan kepada pecandu narkoba, penyalah guna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba setelah menjalani intervensi atau rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang merupakan bagian yang integral dalam rangkaian rehabilitasi.

Pada tahun 2024, target layanan pascarehabilitasi BNN Kota Jakarta Selatan adalah sebanyak 15 (lima belas) orang dimana target tersebut telah terpenuhi yang dapat diukur dari persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup sebanyak 75.24 Indeks (110.65%). Pencapaian tersebut melebihi target yang ditetapkan, yaitu 68 Indeks, sehingga dapat disimpulkan bahwa layanan pascarehabilitasi di BNN Kota Jakarta Selatan berjalan dengan sangat baik dan mampu meningkatkan kualitas hidup penyalahguna/pecandu narkoba.

Seluruh klien yang mendapat layanan pascarehabilitasi merupakan klien yang berasal dari unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Pela Mampang dan klien yang telah menyelesaikan rehabilitasi rawat jalan di Klinik Swastinara BNN Kota Jakarta Selatan.

#### **Sasaran Kegiatan 5**

Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi

Rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkoba merupakan suatu proses pemulihan atas gangguan ketergantungan penyalahgunaan narkoba baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang yang bertujuan merubah perilaku dan mengembalikan fungsi individu di masyarakat.

Proses rehabilitasi adalah upaya rehabilitasi narkoba yang

dilakukan sebagai tindakan represif yang dilakukan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Jakarta Selatan Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 3.9**  
**Indikator Kinerja Jumlah Petugas Penyelenggara Layanan IBM yang Terlatih**

Capaian 2022		Capaian 2023		Tahun Anggaran 2024			Target Akhir 2025
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	
-	-	5	10	10	10	100	5

Intervensi berbasis masyarakat (IBM) adalah intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

IBM merupakan pendekatan rehabilitasi dalam bentuk minimal dan ambang batas rendah (*low threshold*) yang berarti layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan banyak persyaratan.

Dalam mencapai target tersebut, BNN Kota Jakarta Selatan telah melatih 10 (sepuluh) orang yang berasal dari unit IBM Bintaro dan Kebayoran Lama Selatan sehingga program peningkatan kapasitas bagi tenaga teknis rehabilitasi berjalan dengan sangat baik.

### Sasaran Kegiatan 6

Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika

Definisi fasilitas rehabilitasi yang operasional adalah lembaga rehabilitasi yang melakukan pelayanan rehabilitasi bagi penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika.

Jumlah fasilitas rehabilitasi yang operasional adalah lembaga medis yang bersedia menjalankan program rehabilitasi. Pada Tahun 2024 BNN Kota Jakarta Selatan mengajukan 4 fasilitas rehabilitasi yang operasional menjalankan program rehabilitasi melalui BNNP DKI Jakarta kepada Deputi Rehabilitasi BNN RI, dan telah mendapatkan persetujuan melalui Perjanjian Kerja Sama antara BNNP DKI Jakarta dan Lembaga Rehabilitasi.

**Tabel 3.10**  
**Indikator Kinerja Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional**

Capaian 2022		Capaian 2023		Tahun Anggaran 2024			Target Akhir 2025
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	
5	5	5	4	3	6	200	6

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut, BNN Kota Jakarta Selatan telah melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan bagi lembaga rehabilitasi narkoba. Kegiatan tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis kepada 6 lembaga. Selain bimbingan teknis, BNN Kota Jakarta Selatan juga melakukan pendekatan serta kesepakatan terkait kesiapan 6 lembaga tersebut dalam melakukan layanan rehabilitasi.

Apabila dibandingkan dengan pencapaian dua tahun sebelumnya, pada tahun 2024 mengalami penurunan target, namun realisasinya menjadi 200%. Faktor keberhasilan pencapaian target yang melebihi dari target yang telah ditetapkan adalah karena semua lembaga rehabilitasi yang menjalin kerjasama dengan BNN Kota Jakarta Selatan memiliki komitmen dan bersedia untuk memperoleh bimbingan intensif dari BNN Kota Jakarta Selatan dalam upaya pemenuhan standar layanan rehabilitasi sesuai SNI 8807:2022. Sedangkan untuk pemenuhan persyaratan umum dan khusus tersebut tidak jarang membutuhkan sumber daya tambahan baik berupa dana hingga tenaga profesional di bidang adiksi. Hal ini menjadi satu perhatian khusus bagi seksi

Rehabilitasi BNN Kota Jakarta Selatan untuk terus membina dan membimbing lembaga-lembaga tersebut dalam memenuhi standar layanan rehabilitasi sesuai SNI 8807:2023. Selain itu kendala yang ditemui dalam operasional rehabilitasi LRKM adalah lembaga kesulitan dalam memberikan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna Narkoba yang berasal dari golongan marjinal seperti anak jalanan yang tidak memiliki identitas kependudukan dan tidak dimungkinkan untuk me *reimburs*t biaya layanan rehabilitasi ke Kementerian Sosial karena tidak adanya identitas kependudukan.

Namun dari capaian target tersebut, ada perbedaan Lembaga Rehabilitasi yang diintervensi setiap tahunnya. Adapun daftar lembaga rehabilitasi yang diintervensi oleh BNN Kota Jakarta Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.11**  
**Daftar Fasilitas Rehabilitasi yang Operasional**

No	Nama Lembaga Rehabilitasi		
	2022	2023	2024
1	Puskesmas Kec. Tebet	Puskesmas Kec. Tebet	Puskesmas Kec. Tebet
2	Yayasan Mutiara Maharani	Yayasan Mutiara Maharani	Yayasan Mutiara Maharani
3	Aljahu Foundation	Yayasan Sahabat Rekan Sebaya	Puskesmas Kec. Cilandak
4	Klinik Utama Titik Balik	Yayasan Sapu Jagad	Yayasan Cakra Sehati
5	Yayasan Cakra Sehati	Yayasan Cakra Sehati	Yayasan Malaka Medicare Indonesia
6			Yayasan Pemulihan Natura Indonesia

Perbedaan lembaga rehabilitasi tersebut dikarenakan sesuai hasil penilaian dari Tim BNN Kota Jakarta Selatan, terdapat lembaga rehabilitasi yang pada saat dilaksanakan Bimbingan Teknis tidak dapat melampirkan persyaratan ataupun lembaga tersebut sudah tidak beroperasi. Upaya yang dilaksanakan oleh BNN Kota Jakarta Selatan adalah dengan mendampingi lembaga rehabilitasi untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan agar lembaga rehabilitasi tersebut berkualitas dan dapat membantu masyarakat yang ingin mendapatkan

pelayanan.

### **Sasaran Kegiatan 7**

Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika

Intervensi Berbasis Masyarakat merupakan kepedulian pemerintah dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di masyarakat dengan cara menghadirkan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di masyarakat, mengingat ketersediaan dan aksesibilitas layanan yang masih terbatas jumlahnya.

Kegiatan IBM dilakukan oleh Agen Pemulihan (AP) yang merupakan warga masyarakat yang tinggal di desa/kelurahan yang terpilih sebagai mitra kerja BNN. Melalui AP, IBM memantau dan mendampingi penyalahguna narkoba tingkat ringan atau yang memerlukan bina lanjut melalui kegiatan dan layanan IBM. Oleh karena itu, program yang dijalankan IBM mempunyai keragaman program rehabilitasi sesuai dengan masalah narkoba dan potensi yang dimiliki masyarakat di wilayah.

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) merupakan suatu program yang berupaya menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan intervensi kepada masyarakat yang telah menggunakan Narkoba. Dimana intervensi ini berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat sehingga keterbatasan akses terhadap rehabilitasi karena faktor geografis, stigma maupun biaya dapat di minimalisir.

BNN Kota Jakarta Selatan pada tahun 2024 memiliki target pembentukan IBM sebanyak 2 Unit yaitu Unit IBM “Astha BBN (Bintaro Bersih Narkoba)” di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan dan Unit IBM “Kebayoran Lama Selatan Bersinar” di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

**Tabel 3.12**  
**Indikator Kinerja Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi**  
**IBM yang Operasional**

Capaian 2022		Capaian 2023		Tahun Anggaran 2024			Target Akhir 2025
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	
1	2	2	2	2	2	100	0

IBM merupakan penanganan terdepan dan terdekat yang berada di tengah masyarakat. IBM akan secara langsung berinteraksi dengan pengguna narkoba, keluarga dan masyarakat sekitar. Hal ini dapat membuat intervensi yang dilakukan IBM menjadi semakin efektif, karena pengguna narkoba beserta keluarga tidak perlu pergi ke tempat lain yang mungkin menjadi hambatan.

Apabila dibandingkan pencapaian tahun 2022 dan 2023, pada tahun 2024 di BNN Kota Jakarta Selatan juga memiliki unit layanan IBM sebanyak 2 (dua) unit. Pembentukan unit IBM ini tidak memiliki kendala yang sulit, karena Kelurahan yang diintervensi adalah Kelurahan Bersinar yang sebelumnya telah ditunjuk dan diintervensi oleh Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya anggaran operasional dan pelatihan/peningkatan kemampuan bagi Agen Pemulihan. Oleh karena itu BNN Kota Jakarta Selatan mendorong pihak kelurahan setempat untuk mengusulkan anggaran terkait kegiatan IBM/P4GN dan/atau mendata potensi pembiayaan dari pihak swasta (CSR) di lingkungan setempat.

## Sasaran Kegiatan 8

### Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Kepuasan Layanan Masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik.

**Tabel 3.13**  
**Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi Narkotika**

Capaian 2022		Capaian 2023		Tahun Anggaran 2024			Target Akhir 2025
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	
3,2	3,2	3,2	3,457	3,6	3,72	103,33	3,75

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.Pan/2/2004 ada 14 unsur sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan;
4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan.

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penerima layanan rehabilitasi dilakukan dua kali dalam setahun. Alat yang digunakan untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat ialah Survei Kepuasan Masyarakat Penerima Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan. Adapun kriteria partisipan, variabel yang diukur, metode pengumpulan data, serta penghitungannya adalah sebagai berikut :

Kriteria inklusi partisipan untuk rehabilitasi rawat jalan adalah:

- a) Usia minimal 18 tahun, dengan asumsi bahwa pada usia tersebut individu secara hukum telah dianggap mampu memutuskan apa yang baik dan tidak baik untuk dirinya;
- b) Usia maksimal 75 tahun, yang diputuskan setelah mendengar masukan dari lapangan bahwa usia maksimal pengguna narkoba yang menerima layanan rehabilitasi;
- c) Jumlah kunjungan minimal tiga kali (termasuk hari saat survei dilakukan);
- d) Dalam keadaan sehat dan mampu menandatangani Informed Consent;
- e) Tidak mempunyai hubungan dengan Tim Peneliti maupun staf UPT Rehabilitasi/ Klinik/LKS BNNP/K/Kab di seluruh Indonesia.

Kriteria eksklusi pada penerima layanan rehabilitasi rawat jalan, yaitu:

- a) Mengalami retardasi atau gangguan jiwa berat sehingga dianggap tidak mampu mengambil keputusan berdasarkan asesmen petugas penyedia layanan;
- b) Dalam kondisi-kondisi lain dimana individu dianggap tidak mampu mengambil keputusan, misalnya dalam keadaan mabuk atau terpengaruh oleh zat tertentu, termasuk alkohol.

Ada 9 (sembilan) variabel atau indikator yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Persyaratan Pelayanan;
- 2) Prosedur Pelayanan;
- 3) Waktu Penyelesaian;

- 4) Biaya;
- 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
- 6) Kompetensi Pelaksana;
- 7) Perilaku Pelaksana;
- 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;
- 9) Sarana dan Prasarana.

Adapun proses pengumpulan datanya adalah sebagai berikut : Partisipan mengisi survei secara online melalui *link* <https://ikm-rehabilitasi.bnn.go.id/> Pada *link* tersebut partisipan akan mengisi provinsi dan klinik tempat ia menerima layanan rehabilitasi, nomor KTP sebagai data untuk memverifikasi klien, persetujuan partisipan, identitas klien, jumlah layanan yang diterima serta pertanyaan-pertanyaan lain sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan oleh Permenpan. Setiap indikator pada survei tersebut memiliki 2 hingga 3 pertanyaan. Setiap pertanyaan memiliki skor 1 hingga 4. Penilaian dilakukan dengan menjumlahkan skor tiap pertanyaan dari seluruh partisipan yang telah lolos *cleansing data*. Kemudian dilakukan penilaian rata-rata pada setiap indikator. Indeks Kepuasan Masyarakat pada penerima layanan rehabilitasi rawat jalan didapatkan dengan menjumlah nilai rata-rata tiap indikator tersebut dibagi dengan 9.

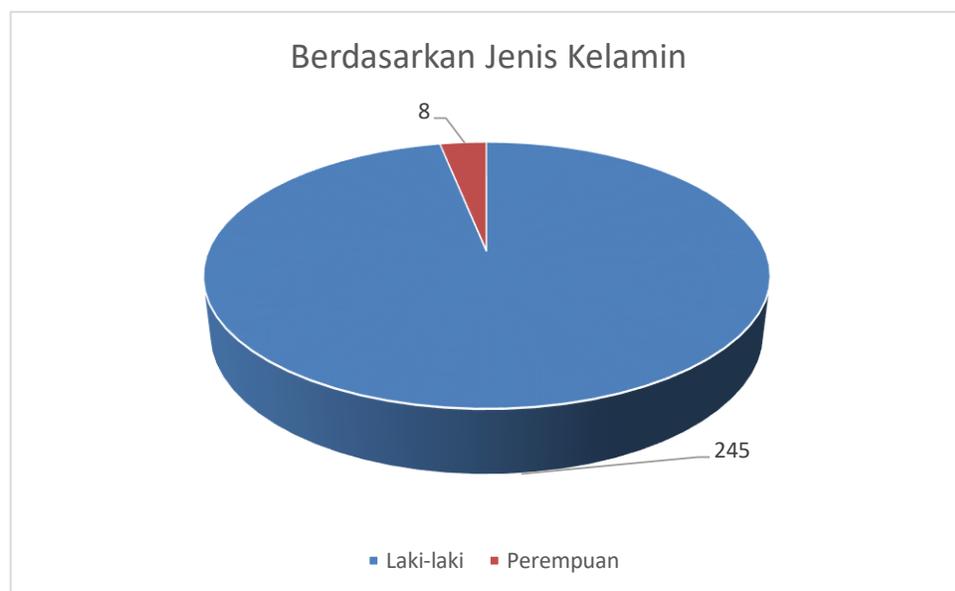
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat penerima layanan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kota Jakarta Selatan pada tahun 2024 yaitu 3.72, sedangkan pencapaian Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR) pada Tahun 2024 BNN Kota Jakarta Selatan mendapatkan hasil 3.91. Dengan hasil ini, BNN Kota Jakarta Selatan telah berkontribusi sangat baik dalam capaian target BNN secara nasional.

Apabila dibandingkan dengan pencapaian dengan dua tahun sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan rehabilitasi di BNN Kota Jakarta Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2022 dan tahun 2023.

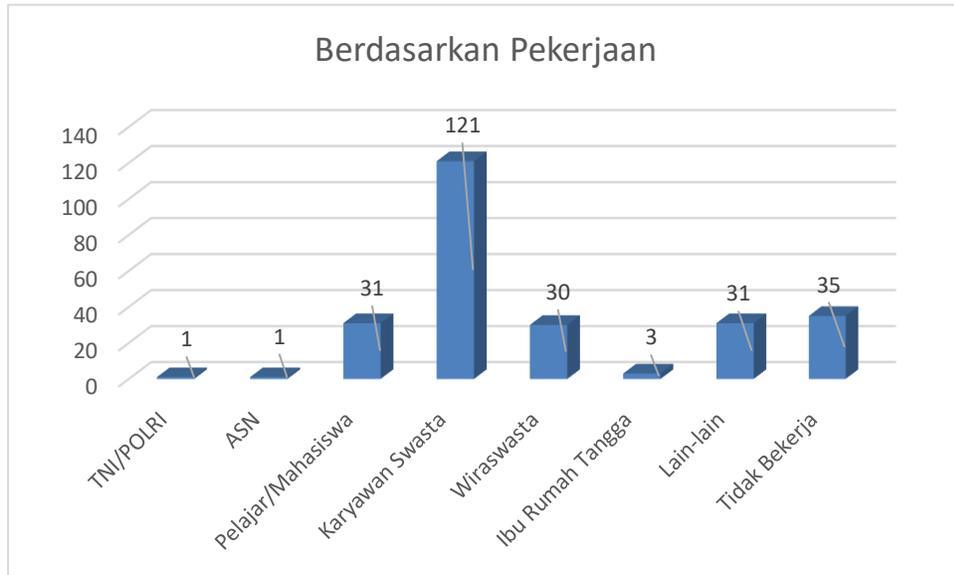
Pada tahun 2024, Klinik Pratama BNN Kota Jakarta Selatan yang didukung oleh SDM (1 dokter, 2 perawat, 5 konselor adiksi dan 1 asisten konselor adiksi) telah melayani sebanyak 253 klien rawat jalan dimana hanya 50 orang klien yang didukung dari anggaran DIPA 2024. Selain itu, Klinik Swastinara BNN Kota Jakarta Selatan telah melayani 548 (lima ratus empat puluh delapan) orang untuk layanan SKHPN (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika).

Faktor keberhasilan atau yang mempengaruhi tercapainya nilai IKM adalah adanya respon positif masyarakat penerima layanan rehabilitasi rawat jalan di klinik BNN Kota Jakarta Selatan terutama untuk unsur pembiayaan layanan rehabilitasi (gratis) serta sikap/perilaku petugas pelaksana layanan rehabilitasi yang kompeten di bidangnya dan tercukupinya sarana prasarana pada klinik pratama BNN Kota Jakarta Selatan. Namun dalam pelaksanaannya juga didapatkan hambatan yaitu beberapa klien belum memperoleh informasi/orientasi terkait prosedur layanan dan rencana rawatan yang cukup dari para konselor adiksi.

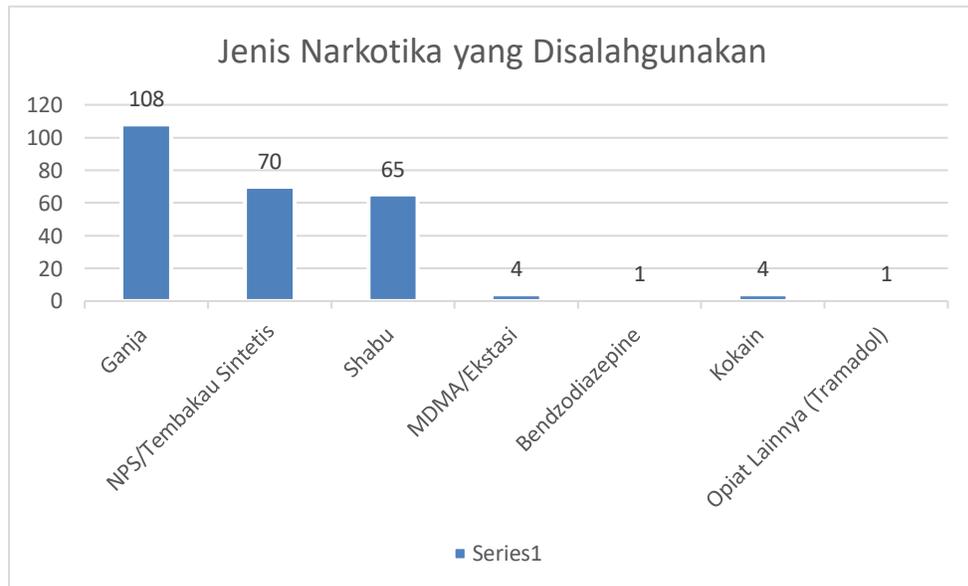
**Grafik 3.2 Karakteristik Klien Rehabilitasi Rawat Jalan berdasarkan Jenis Kelamin**



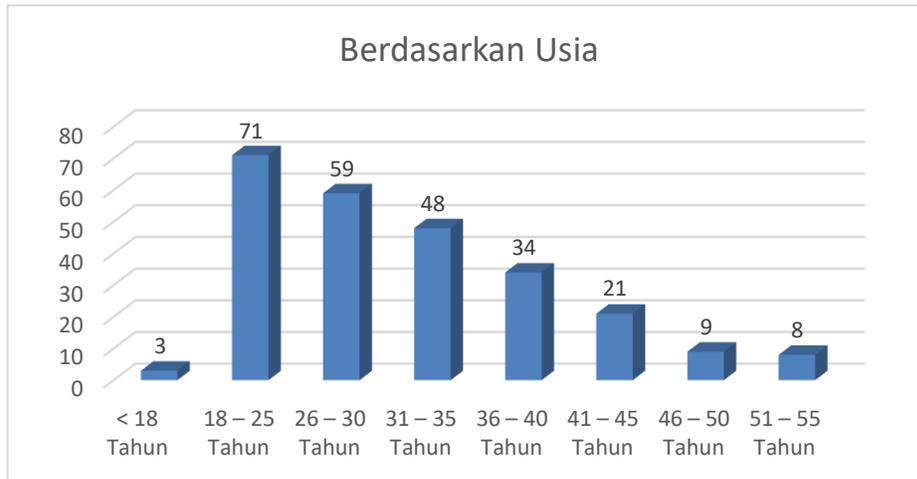
**Grafik 3.3 Karakteristik Klien Rehabilitasi Rawat Jalan berdasarkan Pekerjaan**



**Grafik 3.4 Karakteristik Klien Rehabilitasi Rawat Jalan berdasarkan Sebaran Zat yang Digunakan**



**Grafik 3.5 Karakteristik Klien Rehabilitasi Rawat Jalan berdasarkan Sebaran Usia**



**Sasaran Kegiatan 10**

Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien

Manajemen kinerja efektif dan efisien merupakan upaya untuk mendukung *Good Governance*, manajemen kinerja yang baik merupakan instrumen untuk mendapatkan hasil-hasil yang lebih baik dari organisasi dengan didukung pengelolaan kinerja sesuai tujuan, sasaran dan standar yang ditetapkan mulai dari proses perencanaan hingga monitoring dan evaluasi.

Sasaran kinerja terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien ini dituangkan dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

**Tabel 3.15  
Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran (NKA)  
BNN Kota Jakarta Selatan  
Tahun Anggaran 2024**

Capaian 2022		Capaian 2023		Tahun Anggaran 2024			Target Akhir 2025
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	
87	88,65	89	88,16	89	98,18	110,31	99

Monev Kinerja Anggaran merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2011 tentang Penyusunan RKA-K/L. Kemudian, secara lebih teknis aturan tersebut diturunkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang telah mengalami dua kali penggantian. Monev ini pertama kali dijalankan dengan mendasarkan pada PMK Nomor 249/PMK.02/2011 yang kemudian diperbaharui melalui PMK Nomor 214/PMK.02/2017. Terakhir, dengan adanya implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, regulasi monev kemudian disesuaikan melalui PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yg sekarang diganti PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Monev Kinerja Anggaran menggunakan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu atau biasa disebut dengan SMART. Semua level yang menjalankan sistem monev ini, menginput data capaian dan memonitor nilainya melalui Aplikasi SMART. Monev Kinerja Anggaran berfokus pada hasil atas anggaran yang telah dialokasikan dan dibelanjakan. Apakah anggaran mampu menghasilkan output dan outcome yang telah ditargetkan. Pada tingkat Satuan Kerja, terdapat empat aspek yang dinilai yaitu Penyerapan Anggaran, Konsistensi, Pencapaian keluaran, dan Efisiensi

#### **1. Penyerapan Anggaran**

Pengukuran tingkat penyerapan anggaran adalah membandingkan antara realisasi anggaran dengan total alokasi/pagu anggaran suatu satker. Data realisasi dan pagu anggaran akan secara otomatis tersaji di SMART. Data pagu berasal dari DIPA Petikan yang telah ditetapkan. Kemudian, Data realisasi berasal dari SP2D dari KPPN.

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{RA}{AA} \times 100\%$$

Keterangan:

P : penyerapan anggaran

RA : realisasi anggaran

AA : alokasi anggaran

## 2. Konsistensi

Pengukuran tingkat Konsistensi antara perencanaan dan implementasi adalah membandingkan antara realisasi penarikan dana setiap bulan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD). Data realisasi penarikan dana setiap bulan dan RPD akan secara otomatis akan tersaji di SMART meliputi Data RPD berasal dari Halaman III DIPA dan Data realisasi penarikan dana setiap bulan berasal dari total SP2D yang diterbitkan KPPN dalam satu bulan.

Pengukuran Konsistensi dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left( \frac{RPDK_n - |RPDK_n - RAK_n|}{RPDK_n} \times 100\% \right)}{n}$$

Keterangan:

K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

RAK<sub>n</sub> : realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan n

RPDK<sub>n</sub> : rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ke n

n : jumlah bulan

## 3. Capaian Output / Keluaran

Pengukuran tingkat Pencapaian keluaran adalah membandingkan antara realisasi capaian keluaran dengan target capaian keluaran. Data realisasi capaian keluaran diambil langsung dari Pengisian Capaian Output pada aplikasi SAKTI dan secara otomatis terupdate setiap periode sedangkan data target capaian keluaran akan secara otomatis akan tersaji di SMART. Apabila data capaian keluaran (output/KRO/RO) telah diisi oleh Satker, secara otomatis aplikasi akan menghitung tingkat efisiensi dalam

pencapaian output. Maksimal nilai per Rincian Output adalah 120 sedangkan maksimal nilai total Capaian Output adalah 100. Pengukuran Capaian Output tingkat satker dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CRO = \left( \prod_{i=1}^m \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right)^{\frac{1}{m}} \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : capaian RO tingkat satuan kerja  
 RVRO<sub>i</sub> : realisasi volume RO i  
 TVRO<sub>i</sub> : target volume RO i  
 m : jumlah RO

#### 4. Efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan ( $\Sigma$ ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan ( $\Sigma$ ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Pengukuran Efisiensi dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

$E_{RO}$  : efisiensi RO tingkat satuan kerja  
 AARO<sub>i</sub> : alokasi anggaran RO i  
 RARO<sub>i</sub> : realisasi anggaran RO i  
 CRO<sub>i</sub> : capaian RO i

Semakin besar alokasi anggaran RO yang tidak digunakan dan volume RO yang tercapai tinggi maka semakin besar nilai Efisiensi.

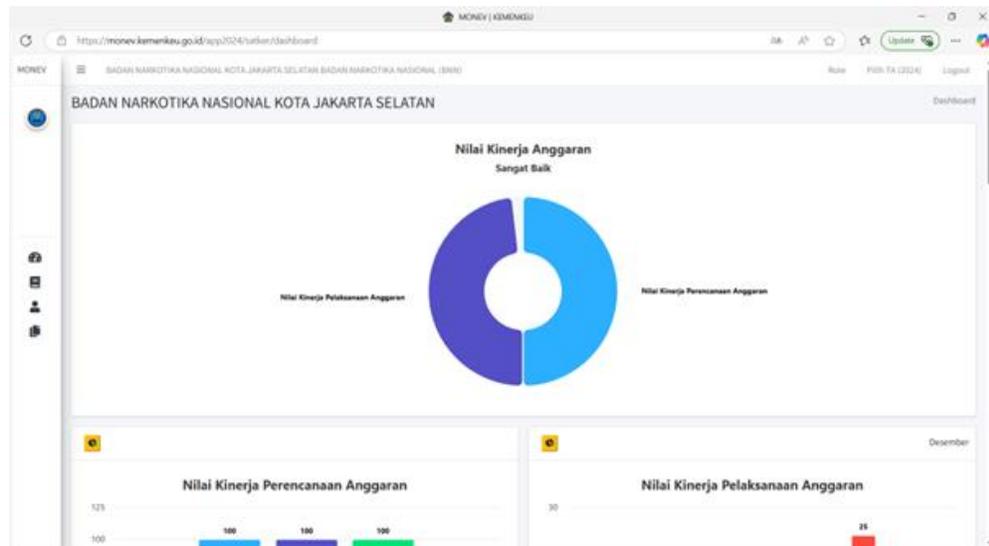
Adapun hasil pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN Kota Jakarta Selatan tahun 2022, 2023 dan 2024 sebagaimana tabel berikut :

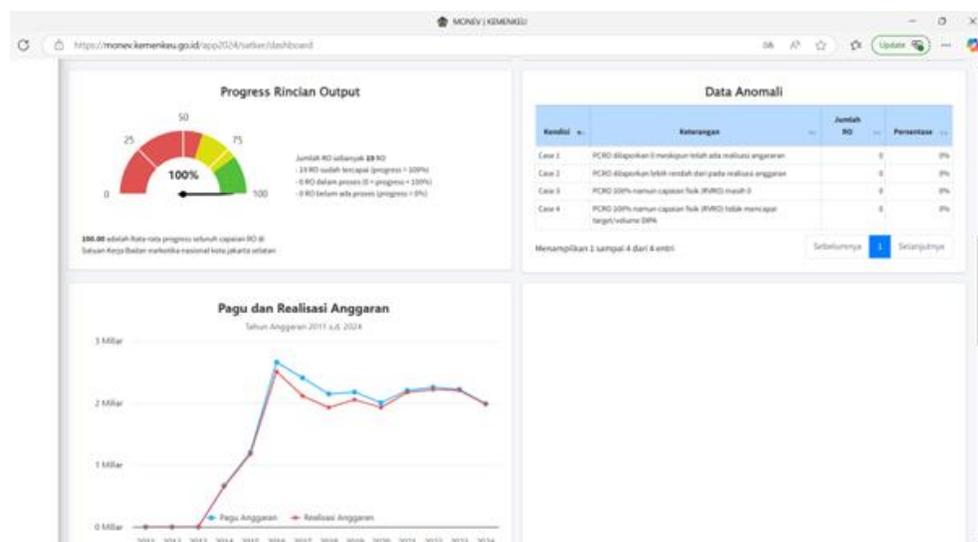
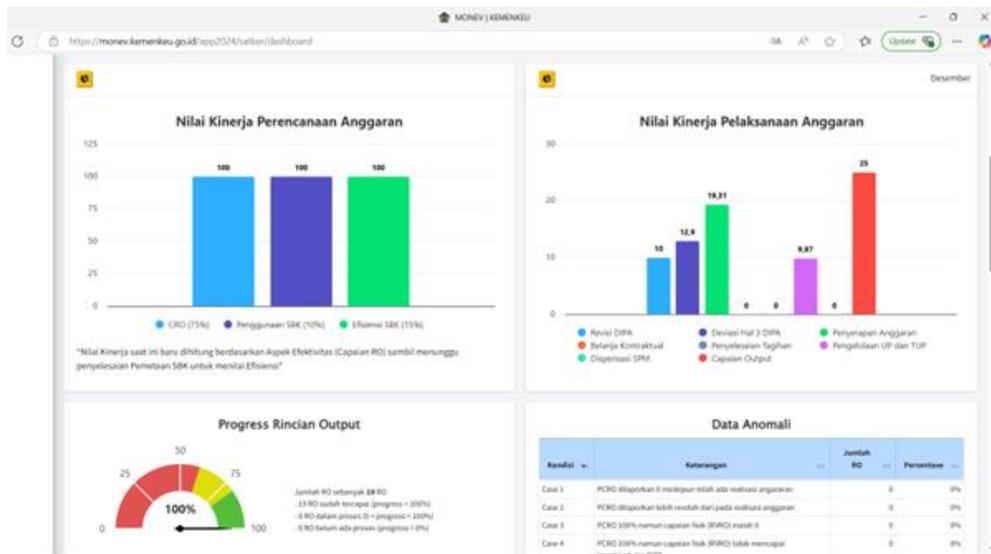
**Tabel 3.16**  
**Hasil Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran (NKA)**  
**BNN Kota Jakarta Selatan**

No.	Kategori	Capaian		
		2022	2023	2024
1.	Realisasi Anggaran	98,61	98,31	99,44
2.	Konsistensi RPD Awal	84,47	96,65	95,65
3.	Konsistensi RPD Akhir	-	-	-
4.	CRO	100	100	100
5.	Efisiensi	1,51	5,21	100
6.	Nilai Efisiensi	53,78	63,02	100
	<b>NILAI AKHIR</b>	<b>83,82</b>	<b>88,65</b>	<b>98,18</b>

Sumber : Aplikasi Smart Kemenkeu

**Grafik 3.6 Nilai Kinerja Anggaran 2024 berdasarkan Aplikasi SMART Kemenkeu**





Apabila dilihat dari tabel dan grafik di atas, terdapat kenaikan target Nilai Kinerja Anggaran dari tahun 2022 ke 2023 yaitu dari 83,82 menjadi 88,65 (kenaikan 5,76%), dan terjadi kenaikan pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2023.

Pada tahun 2024, realisasi NKA mencapai target di atas 100%, hal ini dikarenakan adanya kerjasama yang baik antara fungsi perencanaan, keuangan dan pelaporan sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran bisa dicapai dengan tepat waktu serta tepat sasaran.

**Tabel 3.17**  
**Laporan Pagu T.A. 2024**  
**BNN Kota Jakarta Selatan**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA SELATAN

**LAPORAN PAGU DANA PER KEGIATAN**

No.	Kode   Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/ Direvisi	Dana Tersedia
1	3236   Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	55,628,000	53,228,000	95.69%	0	1,200,000	1,200,000
2	3237   Pengembangan Organisasi, Tataleaksana, dan Sumber Daya Manusia	11,320,000	11,138,185	98.39%	0	0	181,815
3	3238   Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran Bnn	7,091,000	4,307,500	60.75%	0	2,780,000	23,500
4	3239   Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	1,133,034,000	1,130,644,727	99.79%	0	165,000	2,224,273
5	3247   Penyelenggaraan Advokasi	106,000,000	106,000,000	100.00%	0	0	0
6	3256   Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	10,330,000	10,330,000	100.00%	0	0	0
7	3257   Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	126,875,000	125,075,000	98.58%	0	1,800,000	0
8	3258   Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	246,350,000	246,350,000	100.00%	0	0	0
9	3259   Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	15,115,000	15,115,000	100.00%	0	0	0
10	3260   Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	198,312,000	196,997,164	99.34%	0	600,000	714,836
11	3979   Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	10,000,000	9,749,208	97.49%	0	150,000	100,792
12	5936   Pengelolaan Informasi dan Edukasi	70,000,000	70,000,000	100.00%	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>1,990,055,000</b>	<b>1,978,934,784</b>	<b>99.44%</b>	<b>0</b>	<b>6,675,000</b>	<b>4,445,216</b>

Disclaimer: Realisasi berbasis akrual dan bersifat bruto

hal : 1 dari 1 halaman

tanggal cetak : 20-01-25 14:29:11 oleh : 015405

**Sasaran Kegiatan 11**

Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian

perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

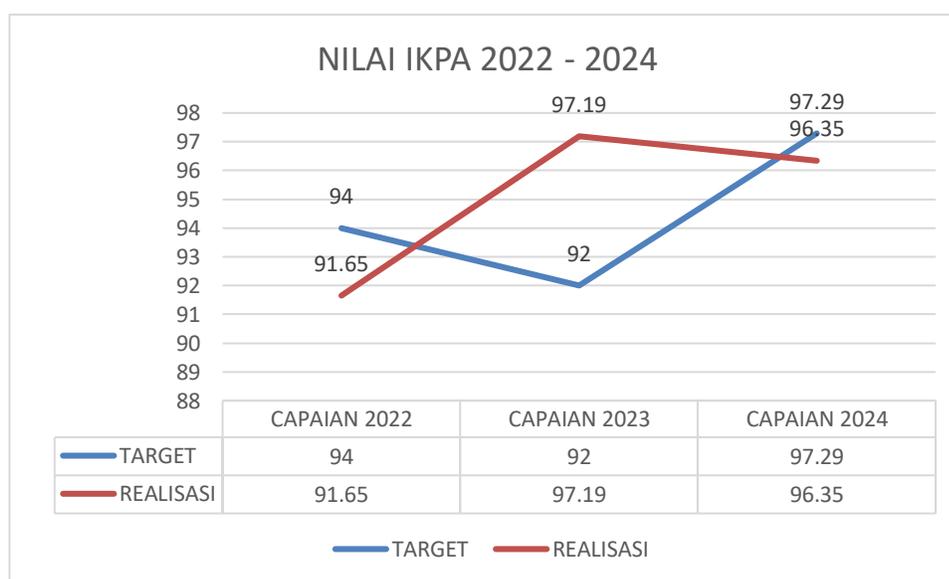
Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-4/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat reformulasi indikator Capaian Output yaitu adanya perubahan nomenklatur dari Konfirmasi Capaian Output menjadi Capaian Output. Perhitungan Capaian Output ini dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO. Selain itu juga terdapat penyesuaian bobot 13 (tiga belas) indikator IKPA.

Adapun nilai IKPA BNN Kota Jakarta Selatan Tahun 2024 adalah sebesar 96,35 atau 99,03% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.18**  
**Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Jakarta Selatan**

Capaian 2022		Capaian 2023		Tahun Anggaran 2024			Target Akhir 2025
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%	
94	91,65	92	97.19	97,29	96,35	99,03	96,45

**Grafik 3.7 Perbandingan Nilai IKPA T.A. 2022 - 2024**



Apabila dibandingkan dengan pencapaian dua tahun sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan capaian IKPA di tahun 2024 namun terdapat kenaikan dari tahun 2022 dan 2023. Adapun rinciannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.19**  
**Hasil Pengukuran Nilai IKPA BNN Kota Jakarta Selatan**

No.	Kategori	2022		2023		2024	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Revisi DIPA	10	10	10	10	10	10
2	Deviasi Halaman III DIPA	10	5,41	10	8,21	15	12,90
3	Penyerapan Anggaran	20	18,22	20	19,55	20	19,31
4	Belanja Kontraktual	0	0	0	0	0	0
5	Penyelesaian tagihan	0	0	0	0	0	0
6	Pengelolaan UP dan TUP	10	9,69	10	9,98	10	9,87
7	Dispensasi SPM	5	5	5	5	-	-
8	Capaian Output	25	25	25	25	25	25
<b>Nilai Total</b>			<b>73,32</b>		<b>77,75</b>		<b>77,08</b>
<b>Konversi Bobot</b>			<b>80%</b>		<b>80%</b>		<b>80%</b>
<b>NILAI AKHIR</b>			<b>91,65</b>		<b>97,19</b>		<b>96,35</b>

Sumber : Aplikasi OM-SPAN Kemenkeu

Dari tabel di atas, terdapat beberapa perbedaan indikator penilaian IKPA di tahun 2024, yaitu di nilai Deviasi Halaman III DIPA tahun 2024 targetnya meningkat dan tidak ada Dispensasi SPM. Di Tahun 2024, deviasi Halaman III DIPA belum mencapai target. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKPA tersebut diantaranya adanya inkonsistensi jadwal kegiatan yang berakibat pada proses pencairan anggaran yang tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang telah ditetapkan.

Adapun upaya yang dilaksanakan oleh BNN Kota Jakarta Selatan adalah melalui proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan lebih intensif dan berkesinambungan yang melibatkan unsur-unsur terkait pada Satuan Kerja BNN Kota Jakarta Selatan.

## 1. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2024, BNN Kota Jakarta Selatan mendapat pagu anggaran sebesar Rp 1.990.055.000 dan telah terealisasi sebanyak 99,44% atau Rp 2.204.610.416 dengan sisa anggaran sebesar Rp 15.943.584.

**Tabel 3.20 Realisasi Anggaran BNN Kota Jakarta Selatan T.A. 2024**

NO	SUBBAG/ SEKSI	PAGU	BLOKIR	REALISASI	%	SISA
1.	SUBBAG UMUM	Rp 1.217.073.000,-	Rp 4.275.000,-	Rp 1.209.067.620,-	99,34	Rp 8.005.380,-
2.	SEKSI P2M	Rp 302.875.000,-	Rp 1.800.000,-	Rp 301.075.000,-	99,41	Rp 1.800.000,-
3.	SEKSI REHABILITASI	Rp 223.757.000,-	Rp 600.000,-	Rp 222.442.164,-	99,41	Rp 1.314.836,-
4.	SEKSI BERANTAS	Rp 246.350.000,-	0	Rp 246.350.000,-	100	Rp 0,-
TOTAL		Rp 1.990.055.000,-	Rp 6.675.000,-	Rp 1.978.934.784,-	99,44	Rp 11.120.216,-

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Kota Jakarta Selatan sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN Kota Jakarta Selatan telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Sebagai satker yang terbentuk pada Tahun 2013 dan berperan melaksanakan fungsi kewilayahan, Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan terus melakukan langkah-langkah konsolidasi dan perbaikan.

Evaluasi pencapaian kinerja yang dilaksanakan selama tahun 2024 mencapai 110,31% sedangkan tingkat capaian keuangan mencapai 99,44%.

#### **B. SARAN**

Untuk meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan, dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya penambahan personil yang permanen untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan P4GN.
2. Meningkatkan bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik internal maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait, dengan muatan pembinaan, dan bukan evaluasi saja.

3. Lebih memaksimalkan peran media elektronik, baik televisi/radio maupun media sosial dan media luar ruang sebagai sarana penyebaran informasi P4GN.
4. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat perlu diadakan upaya seperti pemberian apresiasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada pegiat anti Narkoba
5. Dengan pelaksanaan program rehabilitasi yang berjangka dan berkelanjutan, sebaiknya telah mempersiapkan bahan seperti regulasi, perjanjian kerjasama, petunjuk teknis, pengadaan barang/jasa sehingga pelaksanaan program rehabilitasi dapat dilaksanakan sejak awal tahun.
6. Optimalisasi IT dan mengupgrade peralatan intelijen sesuai dengan perkembangan teknologi dan semakin menjalin kerjasama dengan para penegak hukum.



## **PERJANJIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2024**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : GAZALI AHMAD, S.I.K., M.H.**

**Jabatan : KEPALA BNN KOTA JAKARTA SELATAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : Drs. JACKSON LAPALONGA, M.Si.**

**Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI DKI JAKARTA**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN KOTA  
JAKARTA SELATAN**

**GAZALI AHMAD, S.I.K., M.H.**

Pihak Kedua,

**KEPALA BNN PROVINSI  
DKI JAKARTA**

**Drs. JACKSON LAPALONGA, M.Si.**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA SELATAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja	52 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	83.482 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Masyarakat	3.30 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68 Indeks
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	3 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.60 Indeks
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	89 Indeks
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN	97.29 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.70.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.106.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.217.645.000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.15.115.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.140.312.000
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.10.330.000
7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.30.000.000
8. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.35.350.000
9. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.87.308.000
10. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.11.320.000
11. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.7.091.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.139.110.000
13. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.10.000.000

Pihak Kedua,  
**KEPALA BNN PROVINSI  
DKI JAKARTA**

**Drs. JACKSON LAPALONGA, M.Si.**

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Pertama,  
**KEPALA BNN KOTA  
JAKARTA SELATAN**

**GAZALI AHMAD, S.I.K., M.H.**



## REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode   Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	3236   Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	PAGU REALISASI	0 0.00%	55,628,000 53,228,000 (95.69%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	55,628,000 53,228,000 (95.69%)
		SISA	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
2	3237   Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	PAGU REALISASI	0 0.00%	11,320,000 11,138,185 (98.39%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	11,320,000 11,138,185 (98.39%)
		SISA	0	181,815	0	0	0	0	0	0	0	181,815
3	3238   Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran Bnn	PAGU REALISASI	0 0.00%	7,091,000 4,307,500 (60.75%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	7,091,000 4,307,500 (60.75%)
		SISA	0	2,783,500	0	0	0	0	0	0	0	2,783,500
4	3239   Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	PAGU REALISASI	0 0.00%	1,133,034,000 1,130,644,727 (99.79%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1,133,034,000 1,130,644,727 (99.79%)
		SISA	0	2,389,273	0	0	0	0	0	0	0	2,389,273
5	3247   Penyelenggaraan Advokasi	PAGU REALISASI	0 0.00%	106,000,000 106,000,000 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	106,000,000 106,000,000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3256   Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	PAGU REALISASI	0 0.00%	10,330,000 10,330,000 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	10,330,000 10,330,000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	3257   Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	PAGU REALISASI	0 0.00%	126,875,000 125,075,000 (98.58%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	126,875,000 125,075,000 (98.58%)
		SISA	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA

8	3258   Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	PAGU REALISASI	0 0.00%	246,350,000 246,350,000 (100.00%)	0 0.00%	246,350,000 246,350,000 (100.00%)						
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	3259   Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	PAGU REALISASI	0 0.00%	15,115,000 15,115,000 (100.00%)	0 0.00%	15,115,000 15,115,000 (100.00%)						
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3260   Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	PAGU REALISASI	0 0.00%	198,312,000 196,997,164 (99.34%)	0 0.00%	198,312,000 196,997,164 (99.34%)						
		SISA	0	1,314,836	0	0	0	0	0	0	0	1,314,836
11	3979   Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	PAGU REALISASI	0 0.00%	10,000,000 9,749,208 (97.49%)	0 0.00%	10,000,000 9,749,208 (97.49%)						
		SISA	0	250,792	0	0	0	0	0	0	0	250,792
12	5936   Pengelolaan Informasi dan Edukasi	PAGU REALISASI	0 0.00%	70,000,000 70,000,000 (100.00%)	0 0.00%	70,000,000 70,000,000 (100.00%)						
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>GRAND TOTAL</b>		<b>PAGU REALISASI</b>	<b>0 (0.00%)</b>	<b>1,990,055,000 1,978,934,784 (99.44%)</b>	<b>0 (0.00%)</b>	<b>1,990,055,000 1,978,934,784 (99.44%)</b>						
		<b>SISA</b>	<b>0</b>	<b>11,120,216</b>	<b>0</b>	<b>11,120,216</b>						

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA  
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
53	BNN KABUPATEN BELITUNG	51.69	TINGGI
54	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	55.94	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b>		<b>54.43</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
<b>9</b>	<b>BNNP KEPULAUAN RIAU</b>	54.39	SANGAT TINGGI
55	BNN KABUPATEN KARIMUN	55.84	SANGAT TINGGI
56	BNN KOTA BATAM	54.35	SANGAT TINGGI
57	BNN KOTA TANJUNG PINANG	55.84	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>		<b>55.11</b>	<b>SANGAT TINGGI</b>
<b>10</b>	<b>BNNP BENGKULU</b>	54.88	SANGAT TINGGI
58	BNN KOTA BENGKULU	52.16	TINGGI
59	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	49.61	RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI BENGKULU</b>		<b>52.22</b>	<b>TINGGI</b>
<b>11</b>	<b>BNNP DKI JAKARTA</b>	55.70	SANGAT TINGGI
60	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	55.64	SANGAT TINGGI
61	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	43.20	SANGAT RENDAH
62	BNN KOTA JAKARTA UTARA	43.71	SANGAT RENDAH
<b>RATA-RATA PROVINSI DKI JAKARTA</b>		<b>49.56</b>	<b>RENDAH</b>
<b>12</b>	<b>BNNP BANTEN</b>	43.44	SANGAT RENDAH
63	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	54.58	SANGAT TINGGI
64	BNN KOTA CILEGON	56.85	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA TANGERANG	55.80	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI BANTEN</b>		<b>52.67</b>	<b>TINGGI</b>
<b>13</b>	<b>BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA</b>	55.51	SANGAT TINGGI
66	BNN KABUPATEN SLEMAN	52.04	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANTUL	49.75	TINGGI
68	BNN KOTA YOGYAKARTA	55.86	SANGAT TINGGI
<b>RATA-RATA PROVINSI DI YOGYAKARTA</b>		<b>53.29</b>	<b>TINGGI</b>
<b>14</b>	<b>BNNP JAWA BARAT</b>	47.36	RENDAH
69	BNN KABUPATEN BOGOR	55.52	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN CIANJUR	55.25	SANGAT TINGGI
71	BNN KOTA BANDUNG	56.40	SANGAT TINGGI
72	BNN KOTA CIREBON	55.91	SANGAT TINGGI
73	BNN KOTA CIMAH	53.62	SANGAT TINGGI
74	BNN KABUPATEN SUKABUMI	55.72	SANGAT TINGGI
75	BNN KABUPATEN GARUT	55.72	SANGAT TINGGI
76	BNN KABUPATEN KUNINGAN	56.18	SANGAT TINGGI
77	BNN KABUPATEN CIAMIS	55.01	SANGAT TINGGI
78	BNN KOTA DEPOK	54.87	SANGAT TINGGI
79	BNN KABUPATEN KARAWANG	48.59	RENDAH

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
49	<b>BNNP KEPULAUAN RIAU</b>	93,393	SANGAT TINGGI
50	BNN KABUPATEN KARIMUN	92,679	SANGAT TINGGI
51	BNN KOTA BATAM	85,446	TINGGI
52	BNN KOTA TANJUNG PINANG	93,214	SANGAT TINGGI
53	<b>BNNP SUMATERA SELATAN</b>	83,214	TINGGI
54	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	77,411	TINGGI
55	BNN KOTA PAGARALAM	86,696	TINGGI
56	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	95,714	SANGAT TINGGI
57	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	86,696	TINGGI
58	BNN KOTA PRABUMULIH	86,339	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	87,768	TINGGI
60	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	81,161	TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	88,750	SANGAT TINGGI
62	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	88,393	SANGAT TINGGI
63	<b>BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b>	84,732	TINGGI
64	BNN KABUPATEN BANGKA	90,714	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA PANGKAL PINANG	84,107	TINGGI
66	BNN KABUPATEN BELITUNG	82,679	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	93,214	SANGAT TINGGI
68	<b>BNNP BENGKULU</b>	81,518	TINGGI
69	BNN KOTA BENGKULU	92,857	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	83,393	TINGGI
71	<b>BNNP DKI JAKARTA</b>	85,982	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	75,982	RENDAH
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	79,286	TINGGI

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
59	BNNK TANJAB TIMUR	3,88	0	0	4	3,71	Sangat Mandiri	A
60	BNN KOTA JAMBI	3,93	0	0	3,85	3,89	Sangat Mandiri	A
61	BNNK BATANGHARI	3,62	0	0	3,58	3,60	Sangat Mandiri	A
62	BNNP BABEL	3,381	0	0	3,397	3,39	Sangat Mandiri	A
63	BNNK PANGKALPINANG	0	0	3,7	3,5	3,60	Sangat Mandiri	A
64	BNNK BELITUNG	3,55	0	0	3,2	3,38	Sangat Mandiri	A
65	BNNK BANGKA SELATAN	0	0	3,96	3,96	3,96	Sangat Mandiri	A
66	BNNK BANGKA	3,62	0	3,7	0	3,66	Sangat Mandiri	A
67	BNNP BENGKULU	3,59	0	0	3,73	3,66	Sangat Mandiri	A
68	BNNK BENGKULU SELATAN	3,8	0	0	3,5	3,65	Sangat Mandiri	A
69	BNNK BENGKULU	0	0	3,69	3,49	3,59	Sangat Mandiri	A
70	BNNP DKI JAKARTA	3,05	0	0	3,52	3,29	Sangat Mandiri	A
71	BNNK JAKARTA SELATAN	3,24	0	2,81	0	3,03	Mandiri	B
72	BNN KOTA JAKARTA UTARA	0	0	3,57	3,52	3,55	Sangat Mandiri	A
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	3,55	0	0	3,67	3,61	Sangat Mandiri	A
74	BNNP BANTEN	3,54	0	3,57	0	3,56	Sangat Mandiri	A
75	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	0	0	3,74	3,36	3,55	Sangat Mandiri	A
76	BNN KOTA TANGERANG	0	0	3,39	3,32	3,36	Sangat Mandiri	A
77	BNN KOTA CILEGON	3,67	0	3,63	0	3,65	Sangat Mandiri	A
78	BNNP JAWA BARAT	0	3,52	0	3,54	3,53	Sangat Mandiri	A

LAMPIRAN  
SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi  
NOMOR : B/47/II/DE/RH.02/2025/BNN  
TANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kabupaten Tanggamus	3.66	3.68	83.33
BNN Kabupaten Way Kanan	3.9	3.45	98.57
BNN Kota Metro	3.9	3.56	88.69
BNNP Lampung	4	3.7	87.18
<b>Banten</b>	<b>3.93</b>	<b>3.57</b>	<b>76.30</b>
BNN Kota Cilegon	4.00	3.82	65.63
BNN Kota Tangerang	3.86	3.59	88.69
BNN Kota Tangerang Selatan	3.86	3.44	77.42
BNNP Banten	4.00	3.52	68.42
<b>DKI Jakarta</b>	<b>3.84</b>	<b>3.65</b>	<b>89.79</b>
BNN Kota Jakarta Selatan	3.91	3.72	75.24
BNN Kota Jakarta Timur	4.00	3.54	92.11
BNN Kota Jakarta Utara	3.63	3.84	99.48
BNNP DKI Jakarta	4.00	3.45	90.05
<b>Jawa Barat</b>	<b>3.56</b>	<b>3.56</b>	<b>80.20</b>
BNN Kabupaten Bandung Barat	3.46	3.44	74.22
BNN Kabupaten Bogor	3.20	3.54	88.31
BNN Kabupaten Ciamis	4.00	3.58	82.64
BNN Kabupaten Cianjur	3.76	3.6	71.88
BNN Kabupaten Garut	3.73	3.86	93.64
BNN Kabupaten Karawang	3.86	3.85	94.32
BNN Kabupaten Kuningan	3.38	3.3	93.27
BNN Kabupaten Sukabumi	3.11	3.28	48.75
BNN Kabupaten Sumedang	3.57	3.47	70.00
BNN Kota Bandung	3.31	3.52	63.69
BNN Kota Cimahi	3.72	3.64	86.23
BNN Kota Cirebon	3.56	3.57	82.69
BNN Kota Depok	3.17	3.5	88.28
BNN Kota Tasikmalaya	3.57	3.59	88.54
BNNP Jawa Barat	3.62	3.53	75.78
<b>Jawa Tengah</b>	<b>3.70</b>	<b>3.62</b>	<b>85.40</b>
BNN Kabupaten Banyumas	3.75	3.9	90.15
BNN Kabupaten Batang	3.61	3.65	89.19
BNN Kabupaten Cilacap	3.62	3.43	98.53
BNN Kabupaten Kendal	3.49	3.53	90.00
BNN Kabupaten Magelang	3.53	3.52	87.10
BNN Kabupaten Purbalingga	3.49	3.57	76.85
BNN Kabupaten Temanggung	4.00	3.82	98.75
BNN Kota Surakarta	3.90	3.53	84.85
BNN Kota Tegal	3.63	3.41	85.19
BNNP Jawa Tengah	4.00	3.7	68.40



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA